

KEKUASAAN BERLEBIH

Di dunia kesehatan dan kedokteran, dikenal setidaknya dua penyebab suatu penyakit. Pertama, penyakit karena kekurangan nutrisi tertentu. Kedua, penyakit karena kelebihan nutrisi tertentu. Keduanya, sama - sama pernah dan sedang memiliki angka jumlah kasus dan kematian yang tinggi.

**NASRULLAH
DOSEN FIB UNMUL**

DUNIA kesehatan mencatat, angka kematian di Afrika pernah sangat tinggi karena kekurangan makanan, bencana kelaparan.

Kini, statistik kesehatan dunia sedang dicermati karena tingginya angka kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh kelebihan makanan. Kelebihan lemak, gula, dan kolesterol misalnya, adalah beberapa diantaranya. Pembaca tentu lebih mengenal nama - nama penyakit yang mengikuti kelebihan tersebut.

Uniknya, jenis penyakit akibat kasus kedua, yakni karena kelebihan makanan ini, selain karena faktor keturunan, lebih banyak diderita oleh kalangan menengah ke atas. Sebaliknya, kita tahu, jenis penyakit yang pertama diderita oleh mayoritas kalangan menengah ke bawah.

Apa yang ada di bidang kesehatan dan kedokteran rupanya tak sulit diadaptasi oleh bidang sosial dan budaya. Termasuk bidang politik dan kekuasaan.

Bukankah di awal - awal ilmu sosial humaniora diisi oleh mereka yang berlatar ilmu - ilmu alam?

Sebut misalnya Emile Durkheim, pencetus teori sosiologi itu adalah orang yang mulanya adalah ilmuwan fisika dan serumpunnya. Noam Chomsky, yang kini dikenal bapak linguistik dunia hingga komentator politik tersohor adalah seorang yang berlatar ilmu biologi.

Dalam ilmu politik, terutama jika dikaitkan dengan analisis sosial budaya, rupanya juga dikenal adanya kelebihan kekuasaan. Fenomena kelebihan makanan, meski tak sepenuhnya serupa, dapat disandingkan dengan gejala kelebihan kekuasaan di dunia politik dan kekuasaan dewasa ini.

DINASTI POLITIK DAN OLIGARKI POLITIK

Beragam istilah dan terminologi yang mewakili substansi dari kekuasaan yang berlebihan. Ada istilah "politik dinasti" yang sering bertukar dengan "dinasti politik". Adapula yang mengoreksi dengan istilah "oligarki politik".

Dan, adapula yang menyebutnya sebagai keserakahan politik atau politik yang serakah (greedy politic).

Para pendukung teori "politik dinasti" dan atau "dinasti politik" — umumnya dari ahli atau yang disebut pengamat politik — berargumen bahwa di alam demokrasi, ternyata ada saja keluarga yang seperti menurunkan kekuasaannya ke anak, menantu, ponakan, dan istrinya laksana di era monarki. Bedanya, di masa monarki mekanisme dan prosedurnya lebih banyak berlangsung secara otomatis, sementara di alam demokrasi, dipilih oleh rakyat — meski kadang pilihannya terbatas dan atau dibatasi secara tidak langsung. Belakangan, terutama di tanah air, media memang dinilai turut andil dalam memproduksi dan mereproduksi istilah "dinasti politik" dan atau "politik dinasti" ini.

Sementara itu, para pendukung istilah dan teori "oligarki politik" — di antaranya oleh para ahli bahasa dan analisis sosial budaya — menilai bahwa istilah "dinasti" adalah milik "monarki". Sekarang masanya demokrasi.

Selayaknya, ketika monarki diganti demokrasi, istilah dinasti juga sepatutnya berakhir. Pun, jika ada jejaring dan simpul keluarga yang muncul berkuasa dan bertahan, itu lebih layak disebut "oligarki". Bukan "dinasti". Begitu argumen dasar pencetus dan pendukung teori ini.

Penggunaan istilah "dinasti politik" dewasa ini di tanah air, oleh penyokong teori oligarki politik, dinilai menggunakan pemaknaan terhadap kata "dinasti" menjadi negatif. Dimana, mulanya dinasti memiliki pemaknaan yang tidak selamanya dimaknai buruk. Pendapat para pendukung teori "oligarki politik" ini, tentu saja terbuka untuk diperdebatkan sebagaimana pendapat dinasti politik sebelumnya.

Secara substansial, kesamaan teori di atas adanya "kekuasaan berlebih". Kelebihan kekuasaan oleh segelintir orang. Di titik ini, para penterori dinasti politik dan oligarki politik sama sama sepakat. Bahwa kelebihan kekuasaan, se-



bagaimana kelebihan makanan dalam ilmu kedokteran dan kesehatan itu tidak baik. Jika perlu, lebih baik dicegah sedari dini sebelum menjadi "penyakit akut".

Bukankah dalil politik klasik memang bilang bahwa "power tends to corrupt" (kekuasaan cenderung korup)? Kekua-

saan berlebih juga berpotensi menciptakan "kanker" pada "demokrasi". Sayangnya memang, sebabnya adalah satu hal: nafsu atau hasrat berlebih. Tepatnya, nafsu mengkonsumsi dan nafsu berkuasa. Dalam bahasa sehari - harinya kelebihan ini dibicarakan sebagai "sifat rakus" (greedy).

GREEDY POLITICS VS GREEN POLITICS: POLITIK RAKUS VS POLITIK HIJAU

Greedy politics (politik serakah) setidaknya menengahi perdebatan terminologis dan konseptual antara istilah dinasti politik (political dynasty) dan oligarki politik (political oligarchy), di atas.

Keduanya pun bersepakat bahwa yang mereka maksud adalah menandai dan makna "politik yang serakah" (greedy politics).

Gramatika (tata bahasa) politik dunia hari ini memang sedang menyoroti dua istilah terbaru: politik rakus dan politik hijau (greedy politics and green politics).

Yang pertama dinilai berlebihan, yang kedua diproyeksi lebih berkelanjutan. Dalilnya adalah, politik rakus cenderung memangsa kemanusiaan dan hijaunya alam ciptaan Tuhan.

Sementara itu, politik hijau diharapkan dan menjanjikan keberlanjutan kehidupan (sustainability of life).

KONTEKS INDONESIA DAN KALIMANTAN TIMUR

Di tanah air, terkhusus di beberapa daerah, termasuk di Kalimantan Timur, telah lama menjadi wacana mengenai dinasti politik, politik dinasti, dan oligarki politik ini. Baik di masa pilkada, pilgub, bahkan pilpres yang lalu. Kaltim menjadi sorotan karena alamnya yang hijau dinilai "dikuras" oleh sistem politik yang ada hari ini.

Terbaru, muncul berita tentang isu pergantian pucuk pimpinan lembaga legislatif Kaltim. Oleh perbincangan di arus bawah, ini dinilai tak lepas dari pertarungan elit politik di Bumi Etam. Media ramai memberitakan. Pengamat pun dimintai pendapat. Hangatlah jadinya.

Namun, yang luput dibin-

cangan secara kritis adalah, apakah ini praktik "dinasti" atau "oligarki" politik? Atau jangan - jangan ini adalah fenomena perebutan elit — yang sebenarnya sudah "surplus" kuasa?

Apapun itu, yang perlu diingat adalah sebagaimana makanan berlebih dapat menciptakan "kanker" pada tubuh manusia, kekuasaan berlebih dapat pula menciptakan "kanker" dalam tubuh kekuasaan itu sendiri. Selalu ada titik balik (turning point) pada setiap hal yang dilakukan secara berlebih.

Terakhir, ketimbang terjebak pada politik serakah (greedy politics) dan keserakahan kekuasaan, lebih terhormat ketika politik hijau (green politics) yang lebih bermoral, beretika, berkemanusiaan dan berkelanjutan untuk alam dan manusia, diamalkan. Wabul khusus bagi Kalimantan Timur, Bumi Etam. ✪✪

SALING

Sambungan halaman 1

Setelah tertangkap basah menemui pengusaha yang sedang berkasus, sumber IndonesiaLeaks menyebut Karyoto hilang gairah membongkar kasus-kasus besar. Belakangan, ia kerap menggunakan nama pimpinan agar kasus-kasus besar di KPK tak dilanjutkan.

"Dia enggak mau ambil risiko," kata sumber IndonesiaLeaks. IndonesiaLeaks berusaha melakukan konfirmasi kepada Karyoto melalui telepon, WhatsApp, dan mengirim surat ke kediamannya di Komplek Polri, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Namun, Karyoto dikabarkan pergi ke Yogyakarta. Usaha mendatangi rumah Karyoto di Yogyakarta juga sudah dilakukan dan berbalas pengusiran. "Tinggalkan tempat! Saya tidak akan menjawab. Saya tidak bisa menjawab harus izin pimpinan," kata Karyoto, Sabtu, 19 Juni 2021.

Jeklin Sitanjak, staf pribadi Ketua KPK Firlu Bahuri mendapat bentakan ketika datang ke ruangan kasatgas kasus korupsi Tanjungbalai pada Rabu, 5 Mei 2021. Ketika itu, ia meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahril.

"Kamu siapa?" ujar sumber IndonesiaLeaks yang mengetahui peristiwa tersebut.

Dokumen yang diminta Jeklin, menurut dua sumber IndonesiaLeaks, berisikan informasi soal dugaan campur tangan Wakil Ketua KPK,

Lili Pintauli Siregar dalam kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Lili diduga pernah berkomunikasi dengan Syahril.

Lili yang pernah menjabat sebagai Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ditenggarai memberi tahu Syahril bahwa KPK sedang menyelidiki kasus jual-beli jabatan yang menyeret namanya.

Dalam BAP yang diminta, ujar sumber IndonesiaLeaks, ada pengakuan Syahril bahwa dirinya memberitahu Lili setelah memberikan uang kepada Ajun Komisari Stefanus Robin Pattuju, penyidik KPK dari Polri.

"Lili memberikan tanda jempol," ujar sumber tersebut. Sumber IndonesiaLeaks juga menyebut bahwa Lili diduga menggunakan posisinya sebagai pimpinan di KPK untuk menekan Walikota Tanjungbalai Syahril untuk menyelesaikan masalah kepegawaian Ruri Prihatini Lubis, adik iparnya yang bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo, Tanjungbalai.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Pada pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan "Insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi".

Dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Lili telah diadukan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Anggota Dewas KPK, Harjono menjelaskan kasus tersebut masih da-

lam proses pemeriksaan. Saat ini, ia sedang memanggil pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut.

"Semuanya yang disebut diperiksa. Kalau yang satu diadukan, tidak hanya satu itu (yang diadukan) saja yang diperiksa. Yang tahu siapa, yang bilang siapa, yang menaksikan siapa," kata Harjono kepada IndonesiaLeaks melalui telepon, Sabtu, 19 Juni 2021.

IndonesiaLeaks telah berusaha melakukan konfirmasi kepada Lili Pintauli Siregar melalui WhatsApp. Pesan dikirim dan sempat dibaca Lili, tetapi hanya satu centang yang didapat saat pesan lanjutan dikirimkan. Panggilan telepon yang dilakukan juga tak berbalas. Begitu juga dengan surat yang dilayangkan kepadanya.

Jauh sebelum praktik dugaan sandera kasus terjadi, sumber IndonesiaLeaks mengaku pernah bertemu dengan Wakil Ketua KPK Nawawi Polomango dan Nurul Ghufon. Keduanya mengeluhkan Firlu Bahuri yang terlalu dominan di KPK. Bahkan, Firlu kerap mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan pimpinan yang lain.

"Katanya sudah tidak ada kolektif kolegal, keputusan tergantung Firlu," ujar sumber tersebut.

Nawawi juga sempat menyatakan keinginannya untuk mengundurkan diri dari KPK lantaran tidak kuat dengan tekanan yang terjadi padanya. Nawawi mengaku kerap diikuti oleh orang-orang yang tidak dikenal.

"Saya bilang jangan mundur dong. Pimpinan harus berbuat, jangan diam," imbuhnya. Saat tim IndonesiaLeaks mendatangi rumahnya,

Nawawi menolak diwawancarai. "Kenapa mengejar-ngejar saya? Saya lagi isolasi mandiri, tolong harga saya," ujarnya pada Kamis, 17 Juni 2021.

Sementara itu, Wakil Komisioner KPK Nurul Ghufon membantah soal dominasi Firlu. Ia mengaku sudah berusaha untuk menyuarkan apa yang ia yakini dan proses di KPK berjalan dengan prinsip kolektif kolegal.

"Di kami (pimpinan KPK) yang kalah suara disuruh merilis (konferensi pers). Jadi, bukan ditekan," kata Ghufon kepada IndonesiaLeaks melalui telepon, Sabtu, 19 Juni 2021.

Ketua KPK, Firlu Bahuri belum memberikan tanggapan tentang berbagai tuduhan yang dialamatkan padanya. Hingga tulisan ini terbit, panggilan telepon, WhatsApp, dan surat yang dikirim ke rumahnya tak direspons.

Mantan komisioner KPK, Saut Situmorang menilai komisi antirasuah tak lagi bertaring apabila ada pimpinan dan pegawai yang tersandera kasus.

"Jadi, munculnya framing-framing saling sandera itu sangat wajar. Karena memang tidak ada keterbukaan. Kalau orang sudah terdesak, semua bisa ditarik-tarik. Apapun dilakukan," ujarnya.

Saut meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan permasalahan di internal KPK. Ia juga menyarankan agar semua pimpinan terbuka untuk mengurangi kecurigaan publik selama ini.

"Kita nggak tau rapatnya seperti apa, ada notulennya atau enggak. Itu bagian yang menimbulkan kecurigaan. Ketika Anda tertutup, saya pasti makin curiga. Publik makin curiga," imbuhnya. ✪✪/YOS/SELESAI

ANCAMAN

Sambungan halaman 1

Karena, persetujuan PAW yang dikeluarkan DPP Golkar tidak mendasar, dan tidak ada penjelasan terkait kesalahan yang dilakukan.

Selain itu, juga mendesak agar DPD Golkar Kaltim, untuk tetap menjadikan Makmur sebagai ketua DPRD Kaltim.

"Kami sangat mendukung Makmur melakukan class action, baik melalui mekanisme partai yakni gugatan ke Mahkamah Partai ataupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena selama menjadi kader dan pimpinan DPRD tidak ada isu miring yang mengarah kepadanya," jelasnya.

Dirinya juga menyayangkan, seorang tokoh pendulang suara terbanyak dalam pemilihan Pileg 2019 lalu, yakni sebesar 38.281 suara diperlakukan tidak adil.

Bukan hal mudah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendapatkan 38.281 suara dalam pemilu pileg 2019 lalu di dapil Kaltim 6 (Bontang, Kutim dan Berau). "Makmur ini sudah menjadi ikon di partai Golkar, khususnya Berau. Tanpa dia (Makmur), Golkar tidak akan mendapatkan suara sebanyak itu. Ini yang harus dipahami. Artinya ada kepentingan oknum tertentu," tuturnya.

Ditambahkan Edy, Makmur kata dia adalah wakil dari masyarakat Berau. Penggantian terhadap Makmur tentu saja akan mengusik harga diri masyarakat Berau. Apalagi jika

dilakukan dengan cara-cara yang tidak pantas dan beretika.

"Kami sebagai masyarakat Berau, sangat keberatan dan protes keras, atas tindakan-tindakan sepihak, dan tidak beretika, yang dilakukan terhadap wakil kami. Kami minta kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur agar bersikap bijaksana dalam menangani serta memutuskan perkara ini," jelasnya.

Bahkan, dirinya juga mengancam akan melakukan aksi pengerahan massa apabila desakan yang dilayangkan tidak mendapat tanggapan dari DPD Golkar Kaltim. "Kami akan mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada di Berau untuk mengawal kasus ini," pungkasnya.

Dalam penjelasannya kepada Disway Kaltim, baru-baru ini, Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudy Mas'ud menegaskan, partainya tidak melakukan PAW. Melainkan hanya penggantian alat kelengkapan dewan (AKD) berdasarkan evaluasi DPP serta aspirasi DPD I dan Fraksi Partai Golkar di DPRD Kaltim.

Menurut Rudy Mas'ud, pertimbangan mengganti Makmur dengan Hasanuddin Mas'ud untuk menyerap aspirasi Fraksi partai Golkar. "Kemudian aspirasi dari teman-teman Parlemen. Dan Yang ketiga (memertimbangkan) daripada struktur Partai DPD I Golkar Kaltim," jelasnya.

"Sepertinya yang diharapkan adalah, pertama memang perlu energi baru, untuk supaya lebih produktif kegiatan kegiatan Partai Golkar di parlemen."

SEBAIKNYA BERTAHAN

Pasca rencana penggeseran dirinya dari Ketua DPRD Kaltim, Makmur langsung merespon. Ia menerima Ketua DPD Gerindra Kaltim, Andi Harun, sehingga muncul spekulasi hendak 'menyeberang'.

Namun pengamat politik dari Universitas Mulawarman, Budiman memperkirakan Makmur tidak akan meninggalkan Golkar, meski pada akhirnya dirotasi dari jabatan.

Makmur dinilai sebagai kader partai yang terkenal loyal kepada partainya sejak dulu. Ia cenderung selalu mendahulukan kepentingan partai ketimbang kepentingan pribadi.

"Sepemahaman saya Pak Makmur tipe orang yang setia dengan partainya. Banyak kasus beliau selalu menang untuk kepentingan Partai Golkar," ujar Budiman menyampaikan analisisnya kepada Disway Kaltim, Senin (21/6).

Oleh sebab itu, Budiman meyakini Makmur akan tetap bertahan di Partai Golkar. Dan pilihan itu dinilai lebih tepat. Pertama, karena sesuai dengan karakternya seperti yang dikenal selama ini. Dan yang kedua, sikap tersebut sekaligus sebagai momentum baginya untuk memperlihatkan kepada pihak-pihak yang berusaha menggantinya.

"Bahwa beliau (Makmur) betul-betul lebih cinta partainya daripada jabatannya. Lebih mengedepankan kepentingan partai daripada kepentingan pribadi."

Hanya saja, menurut Budiman, mantan bupati Berau itu berhak mempertanyakan ke partai mengenai alasan penggantian dirinya oleh kader lain. Bukan dalam rangka membela diri. Sebab, menurut Budiman, bukan karakter Makmur pula suka membela diri.

Di samping itu, membela diri disebut hanya tepat dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesalahan. Sementara sejauh yang terlihat, politisi sepuh itu tak pernah membuat kesalahan yang menonjol semasa menjabat. Karenanya mempertanyakan alasan penggantian dinilai perlu dilakukan Makmur.

Pengamat politik lainnya, Sony Sudiar menilai, dalam posisi saat ini, Makmur harus bertahan di Partai Golkar. Dan mempertahankan posisinya sebagai pimpinan DPRD Kaltim. Tujuannya untuk membuktikan kepada publik terkhusus konstituen yang telah memilihnya dalam Pileg.

Sony melihat, dengan bertahan di Partai Golkar, akan semakin membuktikan bahwa Makmur adalah figur kuat yang sangat dibutuhkan Partai Golkar. Mengingat rekam jejaknya sebagai kader partai militan, juga politisi kawakan dengan jam terbang politik yang tinggi. Keberadaan Makmur di Partai Golkar disebut dapat mengkonsolidasikan kekuatan politik daerah. Karena itu, menurutnya, Partai Golkar akan rugi besar jika kehilangan sosok Makmur HAPK.

Soal mempertahankan palu sidang pimpinan dewan, menurut Sony masih ber-

peluang besar bagi Makmur. Ia menerangkan, bahwa SK penetapan pimpinan DPRD sejatinya ditandatangani oleh Kepala Daerah. Dalam hal ini Gubernur. Yang secara administratif dilakukan oleh KPUD sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan.

"Ini artinya pergantian pimpinan DPRD itu harus melalui prosedur tersebut. Yang melibatkan pemerintah daerah dan bukan hanya sekehendak partai politik. Jadi meskipun partai politik mengusulkan pergantian, tapi kalau gubernur tidak tanda tangan maka tidak akan terjadi pergantian," jelas pengajar Fisipol UNM.

"Keualai partai politik mengambil cara ekstrem yaitu menempuh jalan pemecatan terhadap Pak Makmur. Sehingga PAW (rotasi) bisa dilakukan karena Pak Makmur bukan lagi kader. Tapi sekali lagi ini adalah cara konyol yg mengabaikan etika politik. Rencana pergantian pimpinan DPRD oleh DPD Golkar sangat tidak mengindahkan prinsip-prinsip etika politik," tutur Sony Sudiar.

Di samping itu, pria berkacamata ini memberi catatan penting, yakni bahwa, jika Makmur memilih mempertahankan posisi pimpinan DPRD, buka berarti pilihan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk insubordinasi Makmur HAPK kepada DPP Golkar dan DPD Partai Golkar Kaltim.

"Sikap bertahan justru menjaga marwah partai," imbuhnya. ✪✪/ZUL/DAS/APP/YOS